

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Penerapan SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang

Nabila Aprilia^{1*}, Indra Satriawan², Yevi Dwitayanti³

^{1,2} Politeknik Negeri Sriwijaya

* E-mail Koresponden : nabilaaprillia325@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 10-07-2025

Revision: 09-08-2025

Published: 11-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1050

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengalisis pengaruh SAKD, akuntabilitas, dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Subyek penelitian berupa 32 OPD di Kota Palembang. Populasi sebanyak 92 pegawai dengan pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data penelitian ini berasal dari data primer. SPSS Versi 26 merupakan sebuah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk pengujian analisis data yang bisa berkontribusi terhadap hasil yang akurat dalam menguji hipotesis antar variabel . Beberapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah SAKD memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sementara itu penerapan SIPD memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: SAKD, akuntabilitas, penerapan SIPD dan Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to assess the effects of regional financial performance accounting systems, accountability, and the implementation of SIPD on the quality of financial reports. The research method used is quantitative. The subjects of the research are 32 Regional Device Organizations in the City of Palembang. The population consists of 92 employees, with sampling taken using purposive sampling. The data collection method for this research is based on primary data. SPSS Version 26 is a statistical software used for data analysis testing that can contribute to accurate results in testing hypotheses between variables. Some conclusions that can be drawn from this research are that the regional financial accounting system has a positive effect on the quality of financial reports, accountability has a positive effect on the quality of

Acknowledgment

financial reports, and the implementation of SIPD has a negative effect on the quality of financial reports.

Keywords: *Regional financial accounting system, accountability, implementation of SIPD, and quality of financial reports*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif sendiri dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Menurut (Jannah, 2023) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka penting untuk dilaksanakannya desentralisasi fiskal. Penyelenggaraan desentralisasi ini salah satunya adalah pembentukan daerah yang semakin efektif dan efisien dalam proses pengelolaan keuangan dalam mengimplentasi pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, pemerintah daerah harus menyampaikan informasi yang bermutu dalam laporan keuangan Laporan keuangan yang berkualitas mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap tahun, LKPD dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk opini. BPK memberikan empat jenis opini, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat atau Menolak Memberi Opini (TMP).

Berikut data hasil rekapan IHPS BPK Kota Palembang :

Tabel 1. Laporan Keuangan Kota Palembang

Periode	Tanggapan BPK
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WDP

Periode	Tanggapan BPK
2023	WTP

Dari : IHPS tahun 2014-2023

Tabel 1 menjelaskan Kota Palembang mendapatkan tanggapan dari bpk dan mempertahankan secara konsisten WTP sebanyak 8 kali dari tahun 2014-2021. Tetapi pada tahun 2022 opini Kota Palembang turun menjadi WDP. Berdasarkan IHPS BPK RI 2023 penurunan opini Kota Palembang disebabkan karena terdapat permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang meliputi permasalahan penyajian Aktiva lancar, aktiva Lainnya, Belanja Operasi dan Belanja Modal. Kemudian pada tahun 2023 opini Kota Palembang naik kembali menjadi WTP dikarenakan telah melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi kewajaran penyajian keuangan .Selain itu, laporan keuangan yang bermutu dapat disebabkan hal-hal antara lain adalah SAKD , tingkat akuntabilitas, serta penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan , faktor pertama yaitu Sistem Akuntansi Keuangan daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah”. Jika tingkat sistem akuntansi keuangan daerah semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik (Oktavia & Rahayu, 2019). Hal tersebut didukung oleh Asih & Pratiwi, (2021) dengan hasil penelitian bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi meningkatnya kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas laporan keuangan. Menurut Tahir dkk, (2020), Akuntabilitas adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan yang diambil. Akuntabilitas mengacu pada pemberi steward kepada pemberi tanggung jawab. Jika akuntabilitas meningkat, laporan keuangan akan lebih transparan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebaliknya, apabila akuntabilitas menurun dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku, meningkatkan risiko korupsi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peneliti mengambil faktor ini karena merujuk pada penelitian terdahulu

yaitu Laksono,(2023) dengan hasil penelitian bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, faktor ketiga yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dirancang untuk menjadi lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel dan memiliki kecepatan, efisiensi waktu, kualitas hasil yang tinggi, memiliki fitur-fitur yg mampu memberikan efektifitas juga efisien kinerja pengolahan dan penyimpanan (Raine, 2023).

Penelitian ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh Sintia dan rekan-rekan, (2022). Berbeda dengan penelitian sebelumnya terdapat dua hal yang berbeda. Pertama, perbedaan pada sampel penelitian, di mana studi terdahulu menggunakan seluruh perangkat daerah di Kabupaten OKI sebagai sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan seluruh perangkat daerah di Kota Palembang. Kedua, perbedaan terdapat pada variabel yang digunakan. Peneliti sebelum ini memakai variabel Penerapan SAKD, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Kualitas Laporan Keuangan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji variabel SAKD, Akuntabilitas, Penerapan SIPD, serta Kualitas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yaitu kuantitatif, yang pengukurannya dilakukan melalui metode statistik deskriptif Sugiyono, (2018). Penelitian dilaksanakan pada seluruh OPD di Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pegawai yang bekerja di 32 OPD Kota Palembang. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 92 pegawai. Analisis data menggunakan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions 26*.

HASIL

Hasil Analisis statistik secara deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAKD	92	38	70	61,11	6,483
Akuntabilitas	92	34	50	43,36	4,518
Penerapan SIPD	92	30	45	39,74	4,030
Kualitas Laporan Keuangan	92	28	45	38,99	4,267
Valid N (<i>listwise</i>)	92				

Sumber : data primer diolah,2025

Temuan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat 92 responden (N), seperti terlihat pada Tabel 2. Dari data responden pada 32 OPD di Kota Palembang tahun 2025, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menunjukkan nilai minimum sebesar 38 dan nilai maksimum sebesar 70, dengan nilai rata-rata sebesar 61,11 serta standar deviasi sebesar 6,483. Dengan demikian nilai rata-rata 43,36 dan standar deviasi sebesar 4,518, variabel akuntabilitas memiliki nilai terendah 34 dan nilai tertinggi yang tercatat adalah 50. Selanjutnya, nilai variabel penerapan SIPD nilai terendah dan tertingginya berkisar 30 hingga 45 dengan rata-rata 39,74 dan standar deviasi sebesar 4,030, sedangkan kualitas laporan keuangan mempunyai nilai terendah sebesar 28, tertinggi 45, dan rata-rata 38,99 dengan standar deviasi sebesar 4,267.

Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Analisis Validitas Nilai Y

Pertanyaan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Y.1	,722	,205	Memenuhi syarat
Y.2	,803	,205	Memenuhi syarat
Y.3	,778	,205	Memenuhi syarat
Y.4	,804	,205	Memenuhi syarat
Y.5	,725	,205	Memenuhi syarat
Y.6	,718	,205	Memenuhi syarat
Y.7	,700	,205	Memenuhi syarat
Y.8	,689	,205	Memenuhi syarat
Y.9	,821	,205	Memenuhi syarat

Sumber : data primer diolah,2025

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat hasil pengujian validitas pada peneliti terhadap sembilan pertanyaan dalam variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Nilai rhitung > rtabel. Secara keseluruhan nilai r_{hitung} lebih besar r_{tabel} yaitu 0,205, oleh karena itu Sembilan pertanyaan di atas dapat dikatakan valid.

Tabel 4. Hasil Analisis Validitas Variabel X1

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Uraian
X1.1	,688	,205	Memenuhi syarat
X1.2	,839	,205	Memenuhi syarat
X1.3	,788	,205	Memenuhi syarat
X1.4	,695	,205	Memenuhi syarat
X1.5	,738	,205	Memenuhi syarat
X1.6	,832	,205	Memenuhi syarat
X1.7	,747	,205	Memenuhi syarat
X1.8	,725	,205	Memenuhi syarat
X1.9	,786	,205	Memenuhi syarat
X1.10	,821	,205	Memenuhi syarat
X1.11	,856	,205	Memenuhi syarat
X1.12	,862	,205	Memenuhi syarat
X1.13	,822	,205	Memenuhi syarat
X1.14	,828	,205	Memenuhi syarat

Sumber : data primer diolah,2025

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji validitas yang dilakukan terhadap sembilan pertanyaan pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) menunjukkan bahwa nilai rhitung lebih besar dari rtabel. Secara keseluruhan, nilai rhitung melebihi nilai rtabel sebesar 0,205, sehingga kesembilan pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 5. Hasil Analisis Validitas Variabel X2

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X2.1	,694	,205	Memenuhi syarat
X2.2	,707	,205	Memenuhi syarat
X2.3	,730	,205	Memenuhi syarat
X2.4	,795	,205	Memenuhi syarat
X2.5	,807	,205	Memenuhi syarat
X2.6	,762	,205	Memenuhi syarat
X2.7	,793	,205	Memenuhi syarat

X2.8	,797	,205	Memenuhi syarat
X2.9	,820	,205	Memenuhi syarat
X2.10	,807	,205	Memenuhi syarat

Sumber : data primer diolah,2025

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat hasil pengujian validitas yang dilakukan peneliti terhadap sembilan pertanyaan yang digunakan dalam variabel Akuntabilitas (X2). Nilai rhitung > rtabel. Secara keseluruhan nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ senilai 0,205, dengan demikian Sembilan pertanyaan di atas dapat dikatakan valid.

Tabel 6. Hasil Analisis Validitas Variabel X3

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Uraian
X3.1	,816	,205	memenuhi syarat
X3.2	,830	,205	memenuhi syarat
X3.3	,786	,205	memenuhi syarat
X3.4	,841	,205	memenuhi syarat
X3.5	,800	,205	memenuhi syarat
X3.6	,860	,205	memenuhi syarat
X3.7	,833	,205	memenuhi syarat
X3.8	,810	,205	memenuhi syarat
X3.9	,843	,205	memenuhi syarat

Sumber : data primer diolah,2025

Dari hasil Tabel 6, hasil uji validitas yang dilakukan terhadap sembilan pertanyaan pada variabel Penerapan SIPD (X3) menunjukkan bahwa nilai rhitung lebih tinggi dibandingkan rtabel. Secara keseluruhan, nilai rhitung melebihi nilai rtabel sebesar 0,205, sehingga kesembilan pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Hasil Analisis Reliabilitas

Analisis diatas menunjukkan instrumen data dalam penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 7. Hasil Analisis Reliabilitas

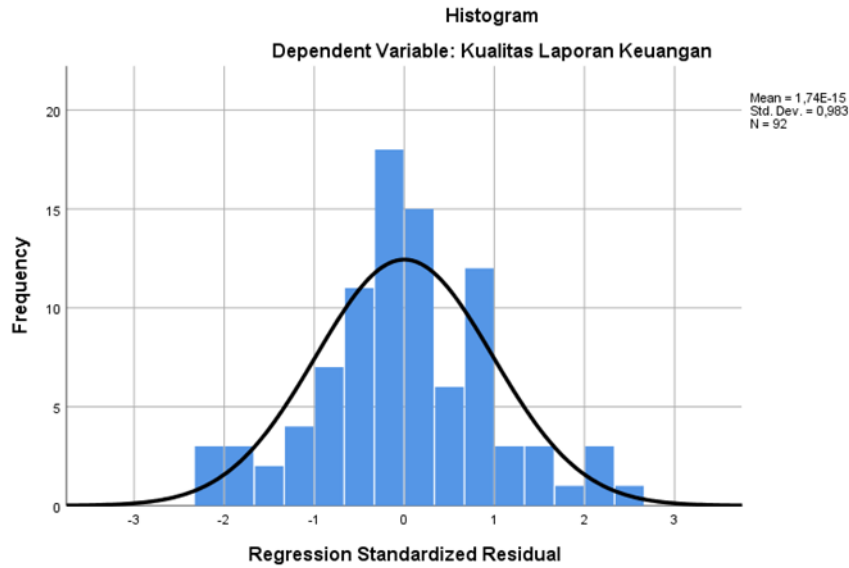
Variabel	Cronbach's Alpha	Rtabel	Keterangan
SAKD	,773	,7	Akurat

Akuntabilitas	,778	,7	Akurat
Penerapan SIPD	,787	,7	Akurat
kualitas laporan keuangan	,778	,7	Akurat

Sumber : data primer diolah,2025

Analisis Asumsi Klasik

Analisis Normalitas



Sumber : data primer diolah,2025

Gambar 1

Diagram Histogram Normalitas

Temuan pada analisis tersebut membuktikan kurva histogram melengkung ke atas sehingga memenuhi syarat asumsi normalitas.

Analisis Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil analisis Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SAKD	,462	2,163
	Akuntabilitas	,721	1,387
	Penerapan SIPD	,461	2,168

a. dependent variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : data primer diolah,2025

Merujuk pada temuan yang tercantum dalam Tabel 9, hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa data yang diuji tidak terindikasi mengalami gangguan multikolinieritas. Dengan kata lain, data tersebut tidak dipengaruhi oleh adanya korelasi yang kuat dan ketergantungan antar variabel independen. Kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa setiap variabel Y dalam penelitian memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang signifikan antar variabel independen yang diteliti.

Analisis Heteroskedastisitas

Tabel 10. Hasil Analisis Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,913	2,879		,317	,752
	SAKD	,092	,057	,250	1,632	,106
	Akuntabilitas	,017	,065	,032	,258	,797
	Penerapan SIPD	-,174	,091	-,293	-1,906	,060

a. dependent variable : RES2

Sumber : data primer diolah,2025

Berdasarkan analisis data diatas menggunakan metode uji park dalam tabel 10 menunjukkan bahwa nilai (*Sig*) untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,106 Akuntabilitas sebesar 0,797 dan Penerapan SIPD sebesar 0,060. Analisis atas ketiga variabel menampilkan $Sig > 0,05$, oleh sebab itu tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian koefisien determinasi (R²) menurut Ghozali (2021:160) berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Dalam output analisis ini, pengujian tersebut digunakan untuk membuktikan sebesar apa pengaruh SAKD, Akuntabilitas, dan Penerapan SIPD.

Tabel 11. Hasil Analisis (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.	,810 ^a	,657	,645	2,543

a. predictors: constant, Penerapan SIPD, Akuntabilitas, SAKD

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber : data primer diolah,2025

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, nilai Adjusted R Square tercatat sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 64,5% ,dapat dijelaskan bahwa ketiga variable x berkontribusi pada variable y.

Analisis Hipotesis

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,594	3,075		1,819	,072
	SAKD	,244	,060	,371	4,035	,000
	Akuntabilitas	,674	,069	,714	9,705	,000
	Penerapan SIPD	-,271	,097	-,256	-2,780	,007

a. dependent variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber : data primer diolah,2025

Berikut penjabaran Analisis Tabel 12 :

$$Y = 5,594 + 0,244X_1 + 0,674X_2 + (-0,271)X_3 + e$$

Rumus tersebut dapat dijabarkan sbb :

Nilai konstanta (a) sebesar 5,594 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan diperkirakan sebesar 5,594 satuan jika variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Implementasi SIPD bernilai nol. Koefisien regresi (b₁) yang bernilai positif sebesar 0,244 menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang searah antara variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kualitas laporan keuangan.

Dengan kata lain, setiap kenaikan satu unit pada variabel SAKD akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 0,244. Koefisien regresi (b₂) mengindikasikan bahwa jika variabel Akuntabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,674 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel Akuntabilitas dengan variabel kualitas laporan keuangan yang artinya jika variabel Akuntabilitas meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0,674 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap atau tidak berubah. Koefisien regresi (b₃) nilai koefisien Penerapan SIPD senilai -0,271 terdapat korelasi negatif antara variabel Penerapan SIPD dan

kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam variabel Penerapan SIPD diprediksi akan menurunkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,271. dengan kata lain variabel lainnya tidak mengalami perubahan.

PEMBAHASAN

Pengaruh SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil hipotesis, variabel sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari batas 0,05, serta perhitungan ($4,035 > 1,987$). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa SAKD berdampak positif dan signifikan terhadap laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Temuan ini membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkat seiring dengan peningkatan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga hipotesis H1 diterima.

Temuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjelaskan “Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, pelaksana, peralatan, dan elemen lain yang bertujuan untuk menjalankan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah”. Perkembangan sistem akuntansi keuangan daerah di Kota Palembang dapat dilihat dari tabel frekuensi jawaban responden di mana skor rata-rata pada variabel tersebut memiliki skor 4,34, dengan ketera sangat baik.

Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik oleh pemerintah daerah Palembang. Sejalan dengan penelitian dari Asih & Pratiwi (2021), Sintia dkk (2022), Gustina (2021), Susanto (2024), dan Meilani (2023), yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Palembang telah mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah secara efektif sehingga mampu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil hipotesis, variabel akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai thitung lebih besar dari ttabel ($9,705 > 1,987$). Dengan demikian, dapat disimpulkan Akuntabilitas terbukti memiliki nilai positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Palembang. Hal ini mengindikasikan

bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga hipotesis H2 dinyatakan diterima.

Hal ini didukung oleh pernyataan Mahmudi (2015:11) yang menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berperan penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas keuangan. Kekuatan utama akuntansi terletak pada penyediaan informasi yang menjadi produk utama akuntansi dan sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun informasi keuangan bukan satu-satunya data yang dibutuhkan, informasi tersebut berperan sebagai landasan penting dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam lingkungan organisasi sektor publik, setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan prinsip akuntabilitas terhadap publik, terutama dalam hal kebijakan. Oleh karena itu, kualitas informasi yang mencakup aspek akurasi, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan keandalan menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas keputusan serta tingkat akuntabilitas publik yang dicapai

Hal tersebut tercermin dalam tabel frekuensi jawaban responden di mana rata-rata skor pada variabel akuntabilitas adalah 4,34 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang baik, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Laksono (2023) dan Iqra (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Widaningrum (2023), Zubaidah & Nugraini (2023), dan Septianingtyas (2017), yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel Penerapan SIPD menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007 berdasarkan hasil uji hipotesis. Ada kemungkinan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang, karena nilai ini < dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} (-2,780) < \text{dari } t_{tabel} (1,987)$. Sehubungan dengan temuan ini, hipotesis H3 diterima karena penerapan SIPD merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, dan semakin tinggi penerapan SIPD, semakin besar kemungkinan kualitas laporan keuangan akan menjadi kurang baik.

Penerapan SIPD merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas laporan

keuangan. Oleh karena itu, OPD di Pemerintah Kota Palembang perlu mengembangkan dan memanfaatkan sistem SIPD agar lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, akuntabel, serta mampu meningkatkan kecepatan, efisiensi waktu, dan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan tabel frekuensi rata-rata skor jawaban responden terhadap penerapan SIPD adalah 4,42 yang masuk dalam kategori sangat baik. Namun, implementasi SIPD di OPD Kota Palembang belum berjalan secara optimal, yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap fitur-fitur aplikasi SIPD dan sering terjadinya gangguan sistem. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mahruzia,2021), (Septiani & Isnawaty, 2024), (Simanjuntak, 2024) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Pratama dkk (2023), Nurpala dan Arrozi (2023), Barus (2023), serta Susanto dkk (2024) yang menemukan bahwa Implementasi SIPD terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Pengaruh SAKD, Akuntabilitas dan Penerapan SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mengacu pada analisis regresi bahwa secara simultan menggunakan uji F, didapatkan nilai probabilitas (F-Statistik) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($56,064 > 3,10$). Dengan demikian, hipotesis H4 diterima, yang berarti variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Penerapan SIPD secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Palembang. Hasil ini mendukung hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian.

Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin meningkat. Menurut Pujanira & Taman (2017), Gustina (2021), dan Susanto dkk (2024), penyajian informasi memerlukan sistem yang baik sebagai dasar penyusunannya. Tingginya tingkat akuntabilitas juga berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Keputusan yang dibuat oleh organisasi sektor publik harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku, apapun yang berkaitan dengan akuntabilitas kebijakan. Sehingga, informasi yang berkualitas mencakup hal-hal seperti akurasi, keterbukaan, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan keandalan merupakan elemen krusial yang memengaruhi kualitas keputusan dan tingkat akuntabilitas kepada publik

Meski begitu, beberapa OPD di Kota Palembang masih mengalami kendala dalam implementasi SIPD, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap fitur aplikasi SIPD serta seringnya terjadi gangguan sistem. Kondisi ini sejalan dengan temuan Mahruzia (2021) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Variabel SAKD (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula, Variabel Akuntabilitas (X2) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, Variabel Penerapan SIPD (X3) memiliki pengaruh negatif namun signifikan, yang berarti bahwa peningkatan dalam penerapan SIPD justru cenderung menurunkan kualitas laporan keuangan. Meskipun demikian, secara simultan ketiga variabel—Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Penerapan SIPD berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan di atas menegaskan bahwa implementasi SAKD yang memadai, peningkatan akuntabilitas, serta penerapan SIPD yang diarahkan dengan baik dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, N. K. S. D., & Pratiwi, N. P. T. W. (2021). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 581-600.
- Badan Pemeriksaan Keuangan RI. 2025. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang. <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Barus, M. P. A. R., Harmain, H., & Tambunan, K. (2023). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Besitang. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(4), 50-73. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2149>
- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 34-54. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.649>
- Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariatel delngan Program IBM SPSS 26.

Semarang: Badan Penerbit

- Giri Laksono, R. (2023). Pengaruh akuntabilitas, komitmen organisasi, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pada SKPD Kabupaten Jember. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5), 3155-3170. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.586>
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(No.1), 56-64. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Iqra, M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Kota Ternate). *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 83-99.
- Jannah, M. (2023). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang) (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Mahruzia, H. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep) (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jatim).
- Meilani, Diah (2023). Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Monika Ferlia, T., Wahyu Setyowati, S., Retnasari, A., & Fariz Irianto, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang) Corresponding Author. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>
- Nurpala, & Arrozi. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 11(2), 187–201.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71*

Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

Oktavia, S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi Kasus Pada Skpd Di Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1).

Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, VI(2), 14–28.

Pratama Domeng, R. (2023). *Efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah pada bpkad kabupaten biak numfor provinsi papua* (Doctoral dissertation, IPDN).

Riswanto, N. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1-7.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.*

Sari, A., Agusmadi, A., & Rangkuti, M. S. (2021, October). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. In *Prosiding SEMDI-UNAYA (Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNAYA)* (Vol. 4, No. 1, pp. 204-214).

Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas sistem informasi pemerintah daerah (sipd) dalam pengelolaan keuangan daerah di sekretariat dprd provinsi jawa barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208. <https://doi.org/10.24198/responsive.v7i4.60881>

Septiningtyas, T. (2017). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada organisasi perangkat daerah di kabupaten kendal)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

- Simanjuntak, g. F. R. (2024). *Penerapan sipd (sistem informasi pemerintah daerah) dalam pengelolaan keuangan pada kantor dprd Kota Medan.*
- Sintia, D., Maria, M., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 107- 112. <https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5198>
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 112–133. <https://doi.org/10.37637/locus.v11i2.284>
- Sugiono.2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H., Arief, M. Y., & Ariyantingsih, F. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME) FEB UNARS*, 3(11), 2081–2094. <https://doi.org/10.36841/jme.v3i11.5312>
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan kepala desa, dan transparansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di kabupaten pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3), 978–988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>